

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Implementasi kebijakan pembentukan Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang menunjukkan bahwa pelaksanaannya sudah berjalan di tahap awal dan dilakukan secara bertahap. Penerapan kebijakan menunjukkan usaha sungguh-sungguh dari pemerintah desa dan pihak terkait dalam melaksanakan kebijakan nasional dengan cara mendirikan lembaga koperasi. Meski demikian, proses penerapan belum mencapai tingkat optimal berdasarkan indikator teori Edward III, terutama dalam hal sumber daya dan komunikasi kebijakan. Hal ini terlihat dari ketidakmampuan pengelola koperasi dalam mengelola secara efektif serta kurang meratanya pemahaman warga mengenai tujuan dan cara kerja koperasi desa.
2. Penelitian ini menemukan bahwa beberapa hal mendukung terwujudnya kebijakan koperasi di Desa Wilulang. Faktor-faktor yang berperan positif meliputi adanya potensi ekonomi desa, dukungan dari pemerintah daerah, semangat gotong royong masyarakat, serta bantuan teknis yang diberikan. Di sisi lain, penerapan kebijakan tersebut masih menghadapi beberapa hambatan, yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang koperasi, keterbatasan tenaga pengelola, modal awal yang tidak cukup, koordinasi antar lembaga yang buruk, serta kurangnya kemampuan dalam mengelola usaha. Faktor-faktor yang menghambat tersebut menunjukkan bahwa kesiapan secara struktur dan budaya masyarakat desa masih belum sepenuhnya sesuai dengan kebijakan yang dibuat secara aturan.
3. Implementasi kebijakan tersebut berdampak pada pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Dari hasilnya, terlihat bahwa Koperasi Desa Merah Putih di Desa Wilulang sudah mulai memberikan dampak awal, terutama dalam membantu masyarakat mendapatkan modal, mendukung usaha pertanian dan UMKM, serta mendorong masyarakat untuk terlibat dalam

kegiatan ekonomi bersama. Selain itu, koperasi bisa membantu memperkuat kemampuan desa dalam mengelola lembaga, yang merupakan alat penting untuk mengembangkan ekonomi daerah. Namun, dampaknya masih belum terlalu besar dan belum terasa secara nyata karena koperasi masih dalam tahap awal pembangunannya. Oleh karena itu, kebijakan tersebut masih perlu diperkuat secara berkelanjutan agar bisa memberikan manfaat ekonomi yang lebih luas dan terus-menerus bagi masyarakat Desa Wilulang.

B. Saran

Pemerintah Desa Wilulang sebaiknya memperkuat perannya dalam memberikan bantuan dan mempermudah serta mengkoordinasikan hal-hal yang mendukung terwujudnya koperasi desa secara berkelanjutan. Upaya ini bisa dilakukan dengan meningkatkan cara menyebarkan informasi tentang kebijakan koperasi kepada masyarakat, dengan pendekatan yang lebih melibatkan masyarakat dan sesuai dengan kondisi setempat, sehingga masyarakat bisa lebih memahami tujuan, manfaat, serta cara kerja koperasi secara lebih baik. Selain itu, pemerintah desa harus menggabungkan program koperasi dengan rencana pembangunan desa, terutama di bidang ekonomi yang menghasilkan pendapatan, agar koperasi tidak berjalan sendiri-sendiri, tapi menjadi bagian dari strategi pembangunan ekonomi desa jangka menengah dan jangka panjang.

Pengurus koperasi desa Merah Putih disarankan untuk memperbaiki kemampuan lembaga dan meningkatkan kualitas pengelolaan koperasi secara profesional. Cara ini bisa dilakukan dengan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia, khususnya di bidang administrasi, pengelolaan usaha, dan keuangan koperasi. Pengurus juga harus membangun komunikasi yang terbuka dan terus-menerus dengan anggota serta warga desa, agar rasa percaya masyarakat terhadap koperasi bisa bertambah secara perlahan. Dengan demikian, koperasi bukan hanya berperan sebagai lembaga resmi, tetapi juga menjadi tempat yang mendukung kegiatan ekonomi bersama yang bisa merespons kebutuhan anggotanya.

Pemerintah daerah sebaiknya memberikan bantuan yang lebih terorganisasi dalam menerapkan kebijakan koperasi desa, seperti bantuan teknis, penguatkan aturan turunan, serta membantu pengajuan dana modal. Pendampingan yang dilakukan secara terus-menerus dan sesuai dengan ciri khas desa diharapkan dapat menghubungkan perbedaan antara kebijakan yang berlaku dan situasi nyata di lapangan. Selain itu, pemerintah daerah juga harus memperbaiki kerja sama antar sektor agar program koperasi desa bisa berjalan dengan selaras dengan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.

Peneliti berikutnya diusulkan untuk melanjutkan penelitian dengan cara yang lebih dalam tentang penerapan kebijakan koperasi desa, dengan menggunakan pendekatan metode yang berbeda, misalnya dengan membandingkan beberapa desa atau menganalisis dampak ekonomi secara angka. Selain itu, penelitian lebih lanjut bisa difokuskan pada aspek keberlanjutan lembaga dan kinerja koperasi dalam jangka menengah hingga jangka panjang, sehingga dapat memberikan sumbangsih yang lebih lengkap dalam mendorong pembentukan kebijakan koperasi desa di masa depan.